

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu HUKUM*. Mandar Maju, 2008.
- Efendi Bachtiar. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni Press, 1993.
- Erna Sri Wibawanti, R. Murjiyanto. *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Manullang, Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Manurung, Abdul Azis. “Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan sebagai Fasilitator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” *Jurnal Keadilan* 2, no. 2 (2022).
- Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum agraria di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1981.
- Rahmi, Elita. *Pembuktian Sertifikat Tanah & Kapita Selekta Hukum Agraria*. Jakarta: Pentas Grafika, 2021.
- Remaja, Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. singaraja, 2017.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Media, 2010.
- Sn, Sigit. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2017.

Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Aekola Surabaya, 2002.

Winanmo, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: laksbang Mediatama, 2008.

Wiradipradja, E.Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.

Jurnal

Arpian. “Penolakan Pengajuan Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak.” *repository Universitas Tanjungpura*, 2023.

Avivah, Lisnadia Nur, Sutaryono Sutaryono, dan Dwi Wulan Titik Andari Andari. “Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah.” *Tunas Agraria* 5, no. 3 (5 September 2022): 197–210. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>.

Bur, Arifin, dan Desi Apriani. *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungan Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*. Jakarta: UIR Law Review, 2017.

Farhan Nadhif Narendra. “Analisis Hukum Praktek Pemecahan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.” *Repository Universitas Islam Sultan Agung*, 2022.

Firmansyah, Hafizh Adi, dan Pudji Astuti. “Problematisa Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 Tentang Pengaturan Organisasi Advokat Terkait Kepastian Hukum Advokat di Indonesia.” *Novum : Jurnal Hukum*

- Universitas Negeri Surabaya* 1, no. 35 (2023): 154–66.
- Gościński, J., & Kubacki, A. D. “Land Registration Concepts in Translation.” *International Journal for the Semiotics of Law* 34, no. 5 (2021): 1451–1482. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11196-020-09800-y>.
- Harefa, Panca Gunawan, Idham Idham, dan Erniyanti Erniyanti. “Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (3 Januari 2023): 113–19. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923>.
- Harvini Wulansari, Rochmat Junarto, dan Dian Aries Mujiburohman. “Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif.” *Riau Law Journal* 5, no. 12021 (n.d.): 61–74.
- Khairina. “Sertifikat Cacat Hukum Dalam Hukum Pertanahan Indonesia.” *Juris* 13, no. 1 (2014).
- Manurung, Abdul Azis. “Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan sebagai Fasilitator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” *Jurnal Keadilan* 2, no. 2 (2022).
- R. Wulan, M. Mustam. “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang.” *Journal of Public Policy and Management Review* 6, no. 3 (2017).
- Remaja, Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. singaraja, 2017.
- Rukhmana, Trisna. “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no.

2 (2021): 28–33.

Setiady, Tri. “Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mengurus Bidang Pertanahan Dihubungkan Dengan Hukum Positif.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 278–94. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.302>.

Syofyan Hadi, Tomy Michael. “Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017).

Tiomarida Sinaga, Sri Kistiyah, Akur Nurasa. “Status Hukum Pemecahan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Sedang Terikat Hak Tanggungan.” *Jurnal Tunas Agraria* 2, no. 1 (2019).

Triningsih, Anna, dan Zaka Firma Aditya. “Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konsitusi.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (11 Desember 2019): 329. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355>.

Ulya, Zaki. “Eksistensi Badan Pertanahan Aceh sebagai Perangkat Daerah di Aceh dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan The Existence of Aceh Land Agency as A Local Apparatus in Aceh in the Aspect of Legal Certainty in Land Sector.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 11 (2015).

Yutanti, Trinda, Trinas Dewi Hariyana, dan Moch. Wahid Hasyim. “Tinjauan Yuridis Pemecahan Tanah Lebih Dari Lima Bidang Untuk Hak Milik Perorangan.” *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 15, no. 1 (25 Mei 2024): 1–12. <https://doi.org/10.37303/magister.v15i1.93>.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.